**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DAN ASAS KEPATUTAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

Oleh :

Rusniati

rusniati813@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang

Warmiyana Zairi Absi

Warmiyana5973@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak

Hadirnya sistem kredit sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dalam melaksanakan suatu kredit tidak terlepas dari suatu perjanjian. Perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*Standard Contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan bank. perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*Standard Contract*). Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima apa saja ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak perbankan, karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan asas itikad baik dan asas kepatutan dalam kredit perbankan. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti juga bahwa kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dalam KUH Perdata kepatutan (asas kepatutan) dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Kata Kunci : Etikad Baik ;Kepatutan ; Kredit Perbankan

Abstract

The presence of the credit system is very helpful for people's lives and even economic growth in a country. In carrying out a credit can not be separated from an agreement. Banking credit agreement uses the form of a standard agreement (Standard Contract). In this regard, in practice the form of the agreement has been provided by the bank as a

creditor, while the debtor only learns and understands it with the bank. banking credit agreement using the form of standard agreement (Standard Contract). This standardized bank credit agreement is needed to meet practical and collective needs. At this stage, the position of the prospective debtor is very weak, so they accept whatever terms and conditions are offered by the bank, because otherwise the prospective debtor will not get the credit in question. The problem in this paper is how to apply the principle of good faith and the principle of propriety in banking credit. The research in this paper is a normative juridical research, which only examines library materials or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. The principle of good faith in the implementation of the agreement also means that we must interpret the agreement on the basis of justice and propriety. In the Criminal Code Civil decency (principle of propriety) is contained in Article 1339 of the Criminal Code Civil law which states that the agreement is not only binding on things that are expressly stated therein, but also for everything something according to propriety, custom or law.

Keywords: good ethics; propriety; Banking Credit

LATAR BELAKANG

Dunia perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Di samping itu perbankan merupakan alat sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini maka upaya menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.¹ Menurut ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut

Pengertian kredit menurut OP. Simonangkir dalam H. Budi Untung, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi

¹ H.R Daeng Naja, *Contract Drafting* , , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.33

kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.² Sedangkan pengertian kredit menurut rumusan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir 11 dan 12 menyebutkan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Hadirnya sistem kredit sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dalam melaksanakan suatu kredit tidak terlepas dari suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Dari Pasal di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:

1. Adanya persetujuan atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur; dan
3. Adanya kewajiban debitur. Kewajiban debitur adalah mengembalikan kredit yang diterimanya, membayar bunga, dan biaya lainnya.

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*Standard Contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan bank. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit.

² Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm.44

Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima apa saja ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak perbankan, karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.³

Praktek bisnis yang berat sebelah yang dipicu oleh hadir dan maraknya perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang “layak” bagi keberadaan asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata Persetujuan Perdata Persetujuan tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kedua asas ini yang diharapkan dapat menjadi pengontrol/pengerem praktek-peraktek perjanjian baku yang berat sebelah. harus dilaksanakan dengan itikad baik.

METODE

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menelaah, mengumpulkan dan menganalisis 3 macam Bahan Hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat^(Bambang Sunggono, 2010) yang terdiri dari:

- 1) UUD 1945

³ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008,

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Hasil Penelitian Hukum, Literatur dan lain-lain.
- c. Bahan hukum Tersier
- Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Cara Mengumpulkan Data

Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam dunia perekonomian, hampir semua kegiatan usaha menikmati kredit dari bank karena ini dari kegiatan bank adalah memberikan pinjaman modal atau kredit serta jasa-jasa lainnya agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh berbagai kemajuan. Seseorang atau badan usaha yang memperoleh kredit berarti ia memperoleh kepercayaan dan kepercayaan tersebut dalam dunia perekonomian dapat diberi atau diterima dalam bentuk uang, barang atau jasa. Penyaluran kredit merupakan salah satu bentuk pelayanan bank bertujuan agar penerima kredit dapat memanfaatkan dana yang berhasil di himpun dari masyarakat, digunakan untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih baik.

Dalam pemberian kredit sangat berhubungan erat dengan perjanjian kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan.

Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh Bank sebagai pemberi kredit, dimana

prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh penerima kredit sesuai dengan syarat yang telah disetujui bersama.⁵

Perkembangan kredit saat ini memang sudah jauh dari bentuk awalnya, terutama karena berbagai kebutuhan manusia yang semakin beragam. Salah satu bukti perkembangan kredit tersebut dapat dilihat melalui jenis-jenis kredit yang dikenal saat ini. Begitu banyaknya jenis kredit memperlihatkan begitu eratnya eksistensi kredit dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia. Sebenarnya perkembangan jenis kredit tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan pembangunan.⁶

Dalam melakukan setiap usahanya, selain mempunyai prinsip kehati-hatian bank wajib memperhatikan prinsip etikad baik salah satunya Hal tersebut tidak terkecuali dalam usaha penyaluran kredit. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh bank sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko akibat kredit dan berkenaan dengan prinsip kehati-hatian dan etikad baik bank. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain penentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio kredit terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio/LDR*), Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), alokasi jumlah kredit untuk golongan usaha tertentu dan batas minimum perolehan bank.⁷

Disadari bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank harus memperoleh keyakinan bahwa kredit yang disalurkan tersebut dapat dikembalikan kembali oleh debitur tepat pada waktunya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka dalam proses pemberian kredit, bank akan mengikuti prosedur pemberian kredit (*Standard Of Procedure/SOP*) yang berlaku di internal bank untuk melakukan penilaian yang seksama atas kemampuan debitur yang lazim menggunakan ukuran 5'Cs yaitu Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Agunan (*Collateral*) dan prospek usaha (*Condition*

⁵ Thomas Suyatno, et. Al. *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999 ,hlm.86

⁶ Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung

of economy), sehingga bank dapat mengetahui bahwa usaha proyek yang dibiayainya layak (*feasible*) dan *bankable*.⁸

Asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti juga bahwa kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dalam KUH Perdata kepatutan (asas kepatutan) dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa erjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pada umumnya, itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) dan kepatutan (Pasal 1339) KUH Perdata disebutkan secara senafas dan Hoge Raad (H.R.) dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepatutan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. (Purwahid Patrik,1994)Dengan demikian, dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan terjadi hubungan yang erat antara keadilan, kepatutan dan kesusilaan dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), maka hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan perjanjian, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Hal ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan perjanjian menurut kata-katanya akan bertentangan dengan itikad baik (apabila pelaksanaan menurut norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil).Hal ini bisa dimengerti karena tujuan hukum adalah memberi manfaat,menjamin kepastian (ketertiban) dan menciptakan keadilan.⁹

⁸ Agus Santoso. *Kredit Macet : Antara Kerugian Negara atau Kerugian Korporasi*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 54

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm43

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan terjadi hubungan yang erat antara keadilan,kepatutan dan kesusilaan dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), maka hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan perjanjian, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Hal ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan perjanjian menurut kata-katanya akan bertentangan dengan itikad baik (apabila pelaksanaan menurut norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil).Hal ini bisa dimengerti karena tujuan hukum adalah memberi manfaat,menjamin kepastian (ketertiban) dan menciptakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso. (2010), *Kredit Macet : Antara Kerugian Negara atau Kerugian Korporasi*, Jakarta
- Bambang Sunggono, (2010), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Beni Ahmad Saebani, (2008) , *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Budi Untung,(2000), *Kredit Perbankan di Indonesia* , Yogyakarta, Andi Offset
- H.R Daeng Naja, (2006), *Contract Drafting* , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, (2010) *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Muhamad Djumhana, (2008) *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Purwahid Patrik, (1994) , *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung, Mandar Maju
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, (2004), *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung Alfabeta
- Subekti, (1987), *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia
- Thomas Suyatno, et. Al. (1999) *Dasar-dasar Perkreditan*, , Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7